



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,
SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710
Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261**

**NOTULENSI PERJALANAN DINAS
RAPAT TIM PELAKSANA
TENTANG PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN VALIDASI EITI**

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Kegiatan Rapat Tim Pelaksana diadakan dalam rangka untuk Penyusunan Laporan EITI 2017 Terkait Standar EITI 2019.

Perjalanan dinas dalam kota dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor: EITI/89/D.III.M.EKON/11/2019 tanggal 14 November 2019 Sub Output Kegiatan Koordinasi Kebijakan Baru EITI (Kode Kegiatan 2502.003).

Perjalanan dinas ini dilaksanakan oleh perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian dan Sekretariat EITI sesuai yang tercantum dalam surat tugas tersebut.

Acara Rapat Penyusunan Rencana Kerja EITI ini dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat: Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM (Pusdatin, Ditjen Minerba) Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak), Kementerian Dalam Negeri.
2. Perusahaan dan Asosiasi : Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
3. Masyarakat Sipil : Publish What You Pay
4. Administrator Independen : PT Veda Praxis
5. Sekretariat EITI

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

- Pada hari Selasa tanggal 25 November 2019 Rapat Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif di Hotel Mercure Harmoni dipimpin oleh Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim
- Asisten Deputi Industri Ekstraktif menyampaikan bahwa Laporan EITI harus segera dikejar target penyelesaiannya karena harus dapat dipublikasikan di akhir tahun 2019.

- Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan diskusi tentang penyusunan Laporan EITI dan tindak lanjut validasi EITI Indonesia.

C. Pemaparan

2. Agus Haryanto – Sekretariat EITI

- Terimakasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara hari ini dan ketersediaan waktu Bapak dan Ibu untuk hadir pada rapat Tim Pelaksana kita ada tiga agenda hari ini, yang pertama tentang Penyusunan laporan EITI 2017, yang kedua tentang Penyusunan Progres Validasi, yang mana sebagai tindak lanjut dari kunjungan Sekretariat EITI Internasional beberapa waktu yang lalu yang meminta untuk memperbaiki hasil sementara dari validasi Indonesia yang dilakukan oleh EITI Internasional, yang ketiga yaitu workplan EITI 2020 kami berharap Bapak dan Ibu dari Tim Pelaksana dapat memberikan masukan terhadap laporan perkembangan yang telah disusun oleh tim IA agar laporan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena jika terlambat untuk menyampaikan ke EITI Internasional bisa dikenakan sanksi berupa suspensi keanggotaan kita di EITI Internasional.

2. Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Terimakasih Pak Agus, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang kita langsung mulai saja, ini mungkin yang ke tiga untuk laporan EITI, jadi agenda kita hari ini sudah disampaikan oleh Pak Agus rapat MSG kita mulai karena ada ketiga unsur pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil sudah ada semuanya. Saya lihat dari pemerintah sudah ada dari Minerba, Pusdatin, Perbendaharaan, dan Pajak dari Kementerian. Dan dari Perusahaan ada Pak Hendra dan dari masyarakat sipil ada Aryanto jadi kita bisa mulai saja.
- Agenda pertama adalah agenda untuk progres penyusunan laporan EITI 2017, yang kedua penyusunan bahan-bahan tambahan untuk validasi laporan EITI 2015, yang ketiga nanti kita bahas work plan EITI 2020 yang sekaligus merupakan tambahan informasi untuk EITI Internasional. Karena kemarin validasi dianggap tidak terlalu lengkap jadi kami akan melengkapi lagi. Saya kira segitu saja mungkin dari Veda Praxis siapa yang akan memimpin silahkan.

3. I Ketut Pradipta Wirabudi – Project Manager IA

- Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang kami hormati seperti yang telah dikatakan tadi kami akan melaporkan perkembangan pelaporan EITI yang mana merupakan kelanjutan dari laporan yang telah kami lakukan pada tanggal 05 November 2019 yang lalu, jadi sesuai dengan kesepakatan saat ini kita ada di tanggal 25 November 2019 kita akan melaporkan perkembangan laporan kami.
- Jadi penyusunan laporan kami akan dibagi menjadi dua, rekonsiliasi dan kontekstual untuk rekonsiliasi nanti Pak Raki akan membawanya dan kemudian akan dilanjutkan kontekstual yaitu saya sendiri, biar cepat Pak Raki akan melaporkan mengenai rekonsiliasi, terimakasih.

4. Syahraki Syahrir - Manager IA

- Terimakasih Pak Ketut, selamat siang Bapak dan Ibu hari ini saya akan presentasikan status dan hasil pekerjaan rekonsiliasi. Status per 22 November 2019 untuk migas data

yang telah diterima adalah dari KKKS/operator ada 73 dari 77 (95%), kemudian dari non operator 70 dari 83 (84%), dan dari instansi pemerintah 6 dari 11 (55%). Kemudian dari minerba per 22 November 2019 kami telah menerima data laporan perusahaan 69 dari 122 (56,55%), dan dari instansi pemerintah 6 dari 10 (60%).

- Ini gambaran untuk migas terlebih dahulu, sejak sosialisasi pada tanggal 3 dan 8 Oktober 2019 status penerimaannya untuk KKKS dari 77 yang belum melapor ada 4 yang sudah melapor ada 73 (95%) dari pelaporan sebelumnya ada peningkatan 9%, dari non operator dari 83 yang belum melaporkan ada 13 dan yang sudah melapor 70 (84%) ada peningkatan 10%, dan dari instansi pemerintah dari 11 ada 5 yang belum melapor dan yang sudah melapor 6 (55%) ada peningkatan 55%.
- Ada 4 KKKS yang di terminasi kemungkinan memang tidak ada informasinya, kemudian ada 13 non operator yang belum merespon ada 8 PIC operator yang belum merespon dan ada 5 PIC non operator yang belum merespon. Dari instansi pemerintah ada 1 PIC yang tidak ada, 2 PIC yang belum merespon dan ada 2 pending data. Dari yang sudah melapor ada yang LO nya belum lengkap yaitu ada 6 K3S dan 23 non operator yang LO nya belum lengkap per 22 November.
- Dan ada entitas yang belum melapor, jika kita lihat detilnya yang di terminasi ada 4 perusahaan, kemudian instansi pemerintah yang belum melapor ada 5 jadi ini yang kita tandai biru memang tidak bisa dihubungi karena tidak ada nomor telepon dan email PIC dari Ditjen Migas kemudian di Pertamina tidak ada respon dari PIC pengganti kemudian di Pemerintah Daerah Jawa Timur juga belum ada respon, sementara Pemda Riau datanya pending dan dari Pemda Sumsel datanya juga pending jadi mereka sudah ada respon tapi belum menyerahkan data.
- Kemudian kalau kita lihat dari non operator yang belum melapor ada 1 sd 8 perusahaan yang belum merespon sama sekali sudah kita coba untuk hubungi namun belum ada respon sementara 9 sd 13 dari PIC non operatornya belum ada respon sama sekali.
- Kemudian ini detilnya LO untuk Migas jika bisa dilihat kami mengirimkannya secara bertahap hingga ketahap 6 ini akan dikirim tanggal 26 November 2019, terakhir kita kirim tanggal 13 November 2019, jadi yang sudah kita terima dari DJP adalah yang tahap 1 dan tahap 2 sementara dari tahap 3 dan tahap 5 kita belum terima datanya dari DJP. Total yang belum lengkap K3S nya ada 6, non operatornya ada 3 dan LO pajak yang belum kita kirimkan ada 29.
- Kontribusi PNBP entitas pelapor migas K3S kalau kita lihat yang sudah lapor dari 73 KKKS tadi totalnya ada 97% sisanya ada 2.84% ini pengaruhnya nanti pada rekonsiliasi yang akan dilakukan.
- Berikutnya adalah kontribusi pajak entitas pelapor migas KKKS dan non operator, bisa dilihat totalnya adalah sebesar 47 triliun secara persentase bisa dilihat nilainya 95%.
- Ini beberapa isu-isu dalam proses rekonsiliasi di sisi migas bisa dilihat tidak adanya informasi peralihan participating interest untuk data tahun 2017 menyebabkan IA perlu menunggu informasi dari laporan EITI 2017 yang disampaikan oleh operator KKKS. Turunnya harga minyak dunia berperan dalam menyebabkan beberapa perusahaan migas pailit atau harus mengadakan perampingan organisasi dan restrukturisasi manajemen. Otorisasi manajemen perusahaan yang memakan waktu, jadi itu juga berdampak ke data yang diberikan kepada kami. Beberapa partner K3S yang merupakan perusahaan asing yang tidak mempunyai kantor perwakilan di Indonesia. Belum mendapatkan data dari Ditjen Migas terkait pengisian formulir EITI 2017, datanya berupa total lifting oil dan gas, data signature bonus dan data Firm Commitment yang dibayarkan, serta perubahan partisipasi interes tahun 2017 yang diminta pada Ditjen Migas oleh IA melalui Sekretariat EITI sampai saat ini belum mendapatkan respon. Kemudian data lifting migas dengan Ditjen Migas terkendala karena belum adanya respon dari unit terkait. Belum diterimanya data dari Pertamina Persero untuk data

pelaporan mengenai Devidend dan informasi lainnya sebagai syarat pengisian formulir pengisian EITI 2017. Belum diterimanya data konfirmasi Government Lifting Oil (dalam USD) dan Data Devident untuk Perusahaan BUMN dari Ditjen Anggaran. Data dari DJP yang diterima baru pada LO batch pertama dan kedua dan untuk LO batch ketiga yang kita kirim setelah tanggal 6 November 2019 dan 13 November juga belum kami terima. Masalah perbedaan persepsi mengenai cash basis dan accrual basis dan juga persepsi pengisian informasi FQR antara K3S dan SKK Migas.

- **Tanggapan Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Karena dari Ditjen Migas belum hadir, itu ada beberapa dari instansi Pemerintah antara lain Pertamina, Ditjen Migas tidak ada respon apa tidak didatangi saja karena masih di Jakarta ditelusuri data nya ada dimana saya rasa ini bukan isu, kecuali sudah didatangi sudah ketemu kemudian tidak mau memberikan data alasannya apa, kalau posisinya diluar kota dan alamatnya tidak ada itu baru bisa dimasukkan kedalam isu. Jika perlu surat dari kami, kami akan berikan jadi tolong untuk dikejar saja.
- Sejauh ini sudah kita datangi hanya memang terkendala dalam mereka menyiapkan data seperti itu pak. Jadi PIC nya siapa kami belum dapat informasi. Untuk migas rencananya kami baru akan ketemu hari kamis besok tanggal 28 November 2019 dan untuk Pertamina belum ada, beberapa hari setelah ini kita akan kejar lagi. Kita harapkan minggu ini sudah selesai yang dari Pemerintah dan jika ada kendala kita akan laporkan lagi.
- Untuk Jatim, kemarin senin kita sudah datang kesana, mereka akan usahakan dalam minggu ini, karena sebelumnya tidak ada respon jadi kita coba untuk datangi Dispenda nya hari senin kemarin jadi dalam minggu ini datanya bisa kami terima.
- Untuk Pemda yang lain Kaltim dan Sumsel sejauh ini sudah kita hubungi PIC nya ada yang alasannya masih tugas luar, kalau Kalsel sudah lengkap dan Kaltim masih belum lengkap tapi kalau data dari Dinas ESDM nya minerba dan migas sudah memberikan data, Riau sudah ada respon juga dari Dinas ESDM nya.

- **Tanggapan Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Untuk pajak, Pak Jonatan bisa dalam minggu ini datanya sudah oke, dan yang masih ada masalah kontak dari Pertamina belum ada. Jadi apa lagi yang masih perlu bantuan MSG untuk migas dulu. Untuk yang LO 4 yang terminasi tidak bisa, itu tidak masalah, untuk perusahaan non operator memang agak susah kalau diluar, coba bisa minta tolong SKK Migas, ini terkesan seolah olah pemerintah tidak bisa tembus ke perusahaannya terkesan pemerintah tidak bisa memanggil perusahaan, bagaimana mau mengawasi.
- Jadi jika nanti operatornya tidak merespon bisa minta tolong ke SKK Migas. Jadi yang dikejar LO nya segera dikasihkan ke Pak Jonatan bisa dikonsultasikan.
- Kita akan tampilkan rekonsiliasi sementara migas per 22 November 2019 antara KKKS dengan SKK Migas masih ada selisih datanya 3% ini masih kita lakukan proses rekonsiliasi masih kita cek lagi angkanya.

- **Tanggapan Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Kan ada kesepakatan kalau sudah dibawah 5% dari sisi accounting kita sudah tidak perlu mengejar lagi jadi karena itu sudah dibawah 5% semua kecuali yang satu itu 8% Bapak tolong dikejar namun secara keseluruhan sudah dibawah 5% berarti sudah bagus.
- Yang 8% sudah ketemu belum karena apa? Mungkin karena itu angkanya juga kecil kecil sehingga offer under lifting sehingga persentase untuk intinya jadi 8%, mungkin bisa dikejar lagi jadi bisa dibawah 5%.
- Dan ini perbedaan akhir total lifting minyak untuk perusahaan yang terminasi datanya kita dapat dari SKK Migas, kemudian total liftingnya dalam USD jadi datanya sudah ada

di SKK Migas tidak bisa kita rekonsiliasi.

- Dan ini dalam volume kalau kita lihat antara K3S dan SKK Migas perbedaan akhirnya juga sudah dibawah 5%, kita bicarakan PPN reimbursement baru kita terima hari ini tapi masih akan di proses dulu, dari DJA masih menunggu konfirmasi. Kemudian ini ada total lifting antara K3S dengan ESDM dan SKK dengan ESDM masih belum bisa kita rekonsiliasi.

- **Tanggapan Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Total lifting antara SKK dengan Ditjen Migas seharusnya sama, hanya sebetulnya data yang kita butuhkan dari SKK itu terkait dengan firm commitment yang belum kita terima seharusnya sama. Seharusnya besok-besok kita harus ada kesepakatan data dari SKK Migas untuk lifting pemerintah.
- Data penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi sudah kita peroleh dan ada rekap data pemda yang kita peroleh, seperti Kalimantan Timur masih belum kita peroleh jadi masih kita kosongkan, yang Jawa Timur juga masih kita kosongkan, berikutnya minerba mungkin Mbak Indria bisa coba bantu presentasikan.

- **Tanggapan Ruwadi – Sekretariat EITI**

- Mau konfirmasi pak, rekonsiliasi yang total lifting untuk volume KKKS dengan ESDM ya? (Jawab : Iya). Kalau yang dalam USD? Ini kan SKK Migas yang sebetulnya menjual atas nama negara kemudian uangnya diterima oleh DJA bukan oleh ESDM, mungkin perlu di cek lagi di scoopingnya jadi rekonsiliasinya antara SKK dengan DJA.

5. Indria – Analyst IA

- Selamat siang, saya akan membantu untuk menjelaskan penerimaan laporan minerba sampai dengan status Jumat lalu tanggal 22 November 2017 sudah diterima dari perusahaan minerba dari 69 dari 122 (57%), dengan kenaikan sejak MSG terakhir sekitar 15%, kenaikannya memang cukup banyak kalau dari persentase memang masih dibawah 60%, padahal sosialisasi sudah disampaikan sejak 3 Oktober 2019 lalu. Kemudian disini ada tanda bintang dari 69 yang sudah dilaporkan masih ada 10 LO pajak yang masih belum lengkap, ini juga masih kita follow up, kemudian untuk 53 yang belum melapor statusnya ada 15 yang sedang dikerjakan jadi kami masih terus mem-follow up via email telepon dan ada juga beberapa yang di visit, 15 itu menurut entitas pelapor sedang dikerjakan, kemudian yang tidak ada tanggapan sebanyak 33 perusahaan, jadi 53 itu paling banyak karena tidak ada tanggapan. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak berproduksi ada 5, rinciannya ada di file berikutnya jika ingin melihat, sekitar 48 ternyata 38 itu tidak hadir jadi memang kalau mau dilihat rute cost dari awal perusahaan tersebut tidak hadir sosialisasi padahal sudah ada 2 page tanggal 3 oktober tidak hadir kemudian kami sudah coba email tidak ada tanggapan, ini untuk perusahaan PKP2B nya tapi hanya 3 dari 33.
- Untuk pemerintah terkait data minerba, kami membutuhkan 10 dari entitas pelapor yang sudah masuk itu 6, sebetulnya sudah lapor 7 tadi pagi dari DJA. Tadi dari DJA sudah diterima, kemudian untuk dari Pemda Jawa Timur sudah di visit hari senin yang lalu dan tadi masukan dari sekretariat juga sudah kami tampung akan terus kami follow up terutama untuk Riau dan Sumatera Selatan yang sudah memberikan informasi datanya memang sedang disiapkan.
- Kembali lagi tadi angka 53 perusahaan yang belum melapor ada 5 yang tidak berproduksi sedangkan yang 48 memang belum lapor tadi di 33 tidak ada tanggapan dan sisanya sedang mengerjakan. Jadi kalau dilihat ada 33 tidak ada tanggapan kalau dilihat dari persentasenya atau coverage dari total penerimaan itu sudah dibawah 10% .
- Dengan kata lain perusahaan yang sudah melaporkan itu coverage nya sudah banyak hampir 90%, ini adalah daftar perusahaan yang hampir sudah tidak bisa berproduksi

kebanyakan dari Kalimantan dan di Bangka Belitung.

- Untuk status penerimaan LO sudah 69 yang sudah didapatkan dari pelapor namun hardcopy LO yang belum disampaikan ada 10, jadi hardcopy dari LO yang sudah kami terima dan sudah kami sampaikan juga ke DJP ada beberapa tanggal ada juga 2 LO minerba yang rencananya akan kami sampaikan besok dari total 57 yang sudah disampaikan ke DJP ini memang 17 yang sudah diterima pada 5 November 2019.
- Kemudian untuk 69 perusahaan yang sudah melapor ini merupakan coverage royalti Pht dan iuran tetapnya total sebesar 34T atau 84% dari total PNPB pertambangan yang sebesar 40T, jadi dari 69 tadi dapat 40% sedangkan yang belum lapor sekitar 16%.
- Kemudian data pajak dari DJP karena tadi baru 17 data perusahaan yang kami dapatkan ini adalah break downnya berdasarkan PPn dan PPh persentase terhadap total penerimaan pajak dari sektor batubara datanya juga kami ambil dari batubara yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba.
 - **Tanggapan Hendra Sinadia – APBI**
 - Untuk data dari perusahaan batubara kami dari APBI juga sudah mencoba memfollow up berdasarkan input dari Veda Praxis, dari 41 perusahaan batubara yang teridentifikasi disini ada sekitar 10 yang anggota APBI kita sudah remind kemereka lagi, hanya yang diluar anggota APBI kami tidak ada data basenya mungkin yang dari minerba bisa membantu.
 - **Tanggapan Ilham Budi - Minerba**
 - Terkait tadi yang data yang belum masuk ada sekitar 15, ada 33 yang belum ada respon dan 5 tidak berproduksi nanti kami diberikan saja datanya, kira kira batas waktunya kapan ya? (Jawab : setelah penyampaian ini juga kami membutuhkan dari MSG untuk menyepakati karena kami di MSG Meeting sebelumnya sudah menyepakati penerimaan laporan itu di 20 November 2019 hanya saja dengan timeline yang sekarang dan progress nya yang juga masih sangat banyak kami membutuhkan masukan dari MSG kira-kira kita mau cut off penerimaan formulirnya itu kapan?), (Jawab : jadi kami minta di list saja nama perusahaannya data apa saja yang masih kurang sama yang tidak ada respon). Untuk masukan saja untuk penyusunan EITI 2020, berarti menggunakan base data 2018 apakah tidak bisa ditarik lebih awal? Jadi mulainya itu disekitar bulan Maret, April atau Mei sehingga dari kami untuk koordinasi dengan perusahaan ada waktu. Kalau dibulan September Oktober November diperusahaan menyiapkan SKP nya waktunya tidak pendek.

6. Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Coba tolong kembali ke jadwal disini draft reportnya tanggal 6 Desember kita geser menjadi 9 Desember sehingga draft reportnya MSG Meetingnya yang semula tanggal 9 Desember menjadi tanggal 13 Desember dan rapat MSG kesepakatannya yang semula tanggal 18 menjadi tanggal 20 Desember. Draft reportnya kita kasih waktu ke IA 2 hari sebelum tanggal 13 Desember di tanggal 11 Desember.
- Jadi tanggal 11 Desember harus draft finalnya, tanggal 13 Desember rapat MSG dan kalau rapat MSG perlu ada perbaikan kita punya waktu seminggu untuk di sepakati tanggal 20 Desember. Bagaimana apakah sanggup untuk IA? Dan di atur waktunya untuk rekonsiliasinya dengan Pak Jonatan khususnya untuk minerba untuk migas semoga bisa lancar.
- Bagaimana temen-temen MSG apakah setuju karena yang memutuskan waktunya dari temen-temen MSG. (Jawab : Pak Hendra setuju, Pak Sigit setuju, Pak Jonatan setuju).
- Tanggal 13 Desember kita rapat MSG dan tanggal 11 Desember draft reportnya kira usahakan bisa masuk kita kirim via email silahkan di cek sebelum tanggal 13. Sementara sekretariat EITI akan membaca bersama-sama dengan IA tanggal 9 desember dan kita

mengundang teman-teman jika ingin hadir dipersilahkan tapi jika tidak kami sekretariat EITI yang akan membaca. MSG terakhir tanggal 20 laporannya harus masuk tanggal 11 dan tanggal 9 kita baca bersama.

7. Indria – Analyst IA

- Baik saya lanjut sedikit lagi untuk pemaparan rekonsiliasi minerba terkait royalti dan pht ada perbedaan awal tapi setelah perbedaan akhir dan sudah di rekonsiliasi ini persentasenya kecil dibawah 1% baik dalam USD maupun Rupiah.
- Kemudian untuk ESDM karena memang masih terkendala data jadi ini kami masih terus memfollow up dan mengilustrasikan kira-kira yang menyebabkan selisih tersebut seperti apa belum di catat dipembukuan atau belum teridentifikasi dalam USD maupun Rupiah dan persentasenya dibawah 1%.
- Rekonsiliasi dengan DJP terkait dengan PPh badan ini juga masih progres dengan ada perbedaan awal terait PPh badan dan PPn yang dilaporkan dalam USD maupun Rupiah dan setelah di rekonsiliasi persentasenya yang masih cukup besar ada di PPn kemudian di PPh badan juga masih ada selisih 20%.

- Tanggapan Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Itu tadi ada angka CSR yang in cash dan in kind itu datanya dari perusahaan atau dari mana? (Jawab : Perusahaan pak), Jadi ada yang dibayarkan ke perusahaan dalam bentuk cash begitu? Infrastruktur dalam bentuk cash maksudnya bagaimana? Itu juga bukan penerimaan negara ya? Inikan angka pengeluaran sosial jadi sebetulnya bukan diterima oleh Pemerintah atau negara tapi dibelanjakan oleh perusahaan untuk pengembangan masyarakat tapi selama ini yang kami tahu bentuknya in kind, kalau ada in cash nanti ada tanya nantinya kan tidak pernah perusahaan memberika uang cash, yang namanya in cash perusahaan memberikan uang cash kepada masyarakat jadi tolong di cek lagi ya.
- Untuk angkanya karena tadi masih belum dapat data jadi masih belum bisa di komentari, sebelum kita beralih ke kontekstual.

8. I Ketut Pradipta Wirabudi – Project Manager IA

- Terimakasih baik kita akan lanjutkan ke kontekstual tidak berubah pada pertemuan tanggal 5 november, dimana pada pertemuan sebelumnya pada bab I hanya tiga sekarang kita tambahkan jadikan 6, dimana Metodologi proses pelaporan, ketentuan kepada negara pelaksana EITI sesuai standar 2016 dan EITI standar 209 kita masukkan ke dalam bab I dan ini berdasarkan masukan pertemuan pada tanggal 5 tersebut.
- Kemudian bab ke II Tata Kelola industri Ekstraktif tetap sama ada 3, hanya secara detil kita masukkan apa yang dimaksud dengan industri ekstraktif rujukannya ada Perpres 6/2010 kemudian pembagian dari industri ekstraktif secara umum migas dan minerba, Landasan konstitusi dan hirarkinya, kemudian regulasinya perizinan dan kontrak bedanya secara umum bedanya secara kontrak sejak diterbitkannya Undang-undang minerba yang baru ada izinnya, kemudian kontribusinya. Kita juga akan coba bahas BUMN dengan regulasi yang berlaku dengan BUMN dan kaitannya dengan Industri Ekstraktif kemudian regulasi yang lain terkait dengan industri ekstraktif.
- Implementasi perizinan dan kontrak ini juga dibahas secaa lebih detil, untuk migas membahas kontrak migas, penetapan wilayah kerja, prosedur lelang wilayah kerja dan sebagainya. Minerba juga seperti keterbukaan data geologi dan kualitas eksplorasi, bahwa kita bahas apakah kualitas eksplorasi indonesia saat ini membaik ataukah sebaliknya, kemudian efektivitas pemberian izin minerba dengan adanya peraturan baru apakah menjadi lebih rumit dan kenyataannya bagaimana dilapangan kemudian timeframe pada perizinan lingkungan ESDM dan KLHK. Kemudian efektifitas instansi terkait perizinan minerba, mengaitkannya dengan mining cadastre kemudian

menjelaskan proses dan instansi dari pengajuan masing-masing izin minerba dan instansi pendukung yang terlibat.

- Implementasi kontribusi industri ekstraktif di Indonesia, migas dan minerba ini juga dilampirkan dengan data.
- Distribusi pendapatan negara dari industri ekstraktif, sistem keuangan negara di Indonesia kita menjelaskan mekanisme penerimaan negara dari industri ekstraktif, dimana semua akan masuk ke kas negara dan sebagainya, kemudian juga penerimaan negara dan pembelanjaan negara.
- Peranan pemerintah melalui BUMN dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif masuk pada bab VI, didalam sub nya ada penambahan penyertaan modal negara, kemudahan struktur kepemilikan saham, investasi BUMN dan pinjaman kepada BUMN dan Laporan Laba Rugi.
- Bab VII membahas Tanggung jawab sosial dan lingkungan pada industri ekstraktif, ini dibahas secara umum dan cukup detil, seperti pengeluaran perusahaan untuk sosial dan lingkungan, pengeluaran BUMN pada quasi fiskal, dan overview tentang kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian negara.
- Bab VIII sistem teknologi informasi terintegrasi industri ekstraktif, diharapkan dengan bab ini kita bisa menunjukkan penangangan di dalam industri ekstraktif mengenai perembangan sistem inline di Indonesia yang terdiri dari MODI, MOMS, MOMI dan e-PNBP, ada perkembangan dan efektifitas sistem online, mainstreaming di sektor pertambangan dan ruang perbaikan.
- Bab IX Reformasi industri ekstraktif Indonesia baik migas maupun minerba. Sebelum kita bahas sub bab 9.1 dan 9.2 kita akan bahas sedikit bagaimana kaitannya dengan industri ekstraktif.
- Bab X EITI standard 2019 menjelaskan adanya standar yakti isu terkait gender, penjualan komoditas dan pelaporan mengenai tata kelola lingkungan dan keterbukaan kontrak.
- Bab XI rekomendasi membahas rekomendasi untuk tata kelola industri ekstraktif.
- Status data laporan kontekstual EITI 2019, untuk migas dari 22 buah data ada 15 data belum didapatkan dan 7 data yang sudah didapatkan, dari migas ada 9, pertama dari DJP, SKK Migas ada 9 dan 5 dari Direktorat Pembinaan Program Migas ini sedang diusahakan sat ini kita sudah mengirimkan surat.
- Untuk data kontekstual minerba ada 30 buah data 27 sudah didapatkan dan baru 3 yang belum didapatkan, 3 itu antaranya dari 1 pajak dan 2 dari Direktorat pembinaan perogram mineral.
- Kemarin ada anggota kita yang ke Kalimantan Timur untuk berusaha mendapatkan data namun juga cukup sulit.

- **Tanggapan Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Masih banyak sekali data yang belum didapat, waktunya sudah sedikit kemudian apa kira-kira rencana action plannya dengan waktu yang hanya tinggal beberapa minggu lagi , sekarang sudah tanggal 25 november sedangkan kita harus sudah membaca tgl 9 desember kalau datanya masih segini banyak saya jadi khawatir untuk rekonsiliasinya karena sebetulnya datanya tidak perlu data primer untuk rekon. Kalau data kontekstual yang migas misalkan penyerapan tenaga lokal asing migas 2014-2019 saya kurang tahu di tahun sebelumnya data ini sudah ada atau belum.
- Masalahnya seperti ini pak, kalau kita perlu data primer kita bisa dapat data sekundernya dari laporan tapi valid, apakah kita perlu membuat disclaimer kita diskusi kalau sampai saat batas waktu kita tidak dapat data primer kita akan ambil dari data sekunder, tapi ini untuk pemerintah maksudnya masa kita ambil dari data sekunder mohon masukan diskusi pak. Karena kami sudah coba beberapa kali tanggapannya SKK

Migas ada 9

- Yang di SKK Migas masalahnya apa pak? (Jawab : untuk SKK PIC nya berbeda sama PIC untuk data rekonsiliasi, nanti coba dihubungi ke Pak Bayu kemarin beberapa kali saya dengan Pak Fatur dan memang agak sulit untuk memfollow up beliau begitu.

- **Tanggapan Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Kalau data dari terbitannya SKK Migas apakah tidak ada? Penyerapan tenaga kerja, realisasi industri migas. (Jawab : kalau data resminya hanya sampai 2017-2018, jadi kalau pakai data 2018 riilnya data 2017 apakah kami diperbolehkan untuk memakai data itu? Kami akan membuat disclaimer dan itu tadi yang akan kami gunakan kalau sampai batas waktunya kami belum mendapatkan data). Kalau terbitan itu pasti sudah dijamin jadi kalau mau menulis asalkan menyebutkan sumber datanya tidak perlu pakai disclaimer lagi. Jadi intinya kalau data itu tidak benar tentunya pemerintah akan mengkoreksi ditahun berikutnya, tapi selama itu sudah diterbitkan sumbernya bapak bisa mereliable dari data itu.

9. Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Baik kita akan mempersingkat waktu sedikit kita masuk agenda ke dua Tindakan lanjut validasi EITI, ada 5 point pertama Discompany Reporting, kedua Tax Waiver, sebelumnya mohon maaf kita tulisnya bahasa inggris karena ini kita akan langsung kirim ke EITI Internasional, yang ketiga Nomination Process for Company Representative in MSG, yang ke empat MSG Industry Representative Outreach to Wider Constituencies, dan kelima Corrective Action Plan. Outputnya diharapkan yang pertama increase company reporting antara lain perusahaan minerba kalau tahun lalu 80 sekarang jangan dibawah 80, kalau tahun kemarin dari 80 perusahaan yang tidak hanya minerba jadi total minerba dan migas, yang menyampaikan LO (Letter of Authorisation) untuk membuka data pajak untuk tahun lalu sekitar 8% itu yang kedua tax waiver, tapi kita tidak harapkan jangan sampai diatas 8% yang tidak menyampaikan. Jadi yang increase company reporting kitaintinya seperti ini in order to improve company participation in submitting report, MSG has pushed IA to implement such measures, cooperate with company association, jadi dengan IMA, IPA, APBI dan sebagainya. Kemudian local governments, menghubungi dinas dinas, kemudian local chamber of commerce ini juga kadin daerah to appeal extractive companies in respected provinces to submit necessary data and information for EITI report ini outputnya di EITI reportnya supaya lebih banyak perusahaannya, jadi kalau baru 69 yang minerba yang kita sampaikan disini tidak dilakukan, jadi kita harapkan jangan 69 paling tidak harus diatas 80 jadi di EITI report seperti itu. Yang responsible itu siapa tentunya independent administrator kemudiankita juga minta temen-temen APBI, IMA untuk mendukung ini.
- Kemudian yang berikutnya Beside that inisiatives MSG explore possibility creating a new regulation under Ministry of ESDM to obligate companies for submitting transparency reports. Ini yang kita diskusikan apakah mungkin nanti kedepan ada surat edaran nanti kita pikirkan diluar itu, tapi intinya seperti itu.
- Kemudian yang tax waiver kan harus ada tax waiver dari perusahaan tahun 2015 yang tidak menyampaikan ada sekitar 17% tahun 2016 ada 8%, jadi kita harapkan yang memberikan LO lebih banyak lagi, jadi yang tidak menyampaikan lebih sedikit jadi kita harapkan dari minerba yang kita harapkan ada 84 itu kalau bisa semuanya menyampaikan jika ada yang tidak menyampaikan harus jumlahnya lebih kecil dari 8%. Nanti outputnya juga di EITI report tugasnya IA.
- Kemudian yang ketiga nomination process for company representative in MSG saat ini company representative di MSG dipilih berdasarkan current practice kebiasaannya Pak Hendra, Pak Joko, Pak Muklis, Ibu Marjolin dipilihnya oleh Direktur Eksekutifnya saja dipilih untuk mewakili MSG dari masing-masing asosiasi ini dipermasalahkan oleh

Internasional karena seolah-olah tidak ada pemilihan yang fear diantara anggota jadi berdasarkan penunjukkan saja itu dipermasalahkan, nah disini In future associations will improve to improve its practice by participation of wider members, jadi kedepannya saya minta Pak Hendra dan lainnya untuk memperbaiki proses itu, paling tidak catatan-catatan siapa saja yang dinominasikan misalkan seperti itu, karena kan kita comment practice Direktur Eksekutif yang dipilih yang sehari harinya ya dia yang ditunjuk kan begitu tapi di standar internasional tidak boleh seperti itu, karena di CSO memang ada proses seperti itu tapi kan di company apa iya Direktur Eksekutif hanya untuk menunjuk anggota yang mewakili di dalam MSG, harus menghubungkan perusahaan dulu kan tidak mungkin, menghubungkan perusahaan terus minta siapa calonnya? Rasanya agak berlebihan juga seperti itu, jadi ini kita bilang ya kita akan improve its practise by participation of wider. Tapi mungkin nanti dipemilihan ada nominasikan dulu berapa misalkan seperti itu, mungkin tidak persis seperti yang dilakukan oleh CSO, yang ada diskusi ada presentasi.

- **Tanggapan Hendra Sinadia - APBI**

- Mungkin untuk industri ini kan sistem yang sudah berjalan kebanyakan Direktur Eksekutif yang nanti akan mewakili asosiasi tersebut didalam tim pelaksana, mungkin saya juga akan berbicara dengan IMA baru saja terfikir bahwa kita coba berlakukan sistem itu tapi mungkin representasi dari asosiasi ada jangka waktu. Misalnya saya ditunjuk dari APBI untuk jangka waktu 1 tahun sehingga ditahun berikutnya kita bisa implement nominasi seperti itu.

- **Tanggapan Aryanto - PWYP**

- Atau seperti ini kemarin kita diskusi yang paling jelas adalah mandat saja, mandat menunjukkan kepada Direktur Eksekutif menerima mandat dari anggota untuk melibatkan dia kedalam EITI.
- Kalau saya detilnya nanti silahkan didiskusikan, disini saya hanya bilang in the future association will improve to improve its practice by participation of wider members. Artinya bisa juga menggunakan seperti di CSO misalkan buat nominasi dulu kemudian dipilih oleh siapa gitu silahkan saja.

- **Tanggapan Hendra Sinadia - APBI**

- Saya memilih coba yang seperti di CSO selain Direktur Eksekutif kita kan ada komite juga mungkin kedepannya kita coba tawarkan pakai komite.

- **Tanggapan Aryanto - PWYP**

- Sebenarnya kemarin kita juga bertanya, sebenarnya pilihan wakil perusahaan di Internasional itu seperti apa? Kan ada Freeport, Total disitu apakah karena dia perusahaan besar saja makanya ada disitu, menurut saya yang paling tepat adalah Pak Hendra sebagai Direktur Eksekutif menerima mandat dari seluruh anggota saja.

- **Tanggapan Hendra Sinadia - APBI**

- Mandat itu nanti melalui proses karena selama ini tidak ada prosesnya, ini yang di kritisikan, makanya ada celah disini di APBI kan ada komite di komite pajak kita ada 3 orang dari 3 perusahaan yang berbeda jadi bisa saja nanti penugasan ke saya mungkin waktunya 1 tahun, dan tahun depannya kita di tawarkan lagi oleh internal APBI dalam komite ini kalau pun nanti komite menunjuk ke saya kan nanti ada prosesnya.

- **Tanggapan Aryanto - PWYP**

- Jadi mandat saja ya, soal bagaimana menyampaikan mandatnya itu tertulis.

- **Tanggapan Hendra Sinadia - APBI**

- Kecuali nanti ada kolom komite bersedia dan dipilih.

- Jadi intinya improve its practice, prosesnya seperti apa silahkan saja nanti.
- Kemudian yang ke empat MSG Industry Representative Outreach to Wider

Constituencies, ini sudah melalui berbagai macam itu.

- **Tanggapan Hendra Sinadia - APBI**
 - Yang rencana itu, kita mau bahas ya, yang rencana buat seminar atau nanti di work plan? (Jawab : di workplan saja).
- Terus yang corrective action ini work plan, will draft an action plan for corrective action to enable industry participation in the EITI Implementation, jadi draftnya sudah ada mungkin Pak Ruwadi mau bahas ini sekarang atau nanti saja?
- **Tanggapan Hendra Sinadia - APBI**
 - Mungkin disini ada teman-teman minerba jadi saya mau update saja, salah satu usulan dari MSG adalah outreach ini ke constituent kami di asosiasi kami juga menyadari bahwa belum seluruhnya anggota paham dengan EITI, meskipun selama ini tingkat laporan relative tinggi di asosiasi tapi pemahaman terhadap EITI belum sama disemua perusahaan, ini yang kita mau improve salah satu usulan mengenai mengadakan asosiasi kerjasama antara IMA dengan APBI membuat satu event yang nantinya melibatkan EITI tapi strateginya adalah kalau kita topiknya khusus EITI nanti orang-orang berfikir ngapain mau datang, ini juga pengalaman kami jadi saya dapat satu tema yang nantinya menggabungkan kepentingan dengan minerba temanya mengenai transparansi penerimaan negara saya sudah diskusi langsung dengan Pak Jonson dan beliau menyambut baik kita bantu sosialisasi upaya minerba dalam upaya dalam digitalisasi pembayaran ke negara dan kaitannya dengan transparansi, jadi nanti akan ada dua topik, topik dari kantornya Pak Jonson sama EITI. Nah orang-orangan kalau ada EITI digitalisasi e-PNBP orang anggota akan tertarik datang dan nanti di selipin sesi berikutnya dari EITI dan Pak Jonson sudah setuju, rencananya kemarin kita mau buat tanggal 22 kemarin juga bertemu dengan Pak Jonson beliau tanya Pak Hendra gimana rencananya? Wah kita tunda, ow ya sudah tidak apa-apa, tapi kita sudah siap mereka sudah diskusikan di internalnya kalau disetujui mungkin kita akan buat di hari jumat ini pak. Mungkin hanya menunggu dari IMA karena belum approve untuk suratnya.
- **Tanggapan Aryanto - PWYP**
 - Kemarin juga kita diskusikan soal meningkatkan kepatuhan itu gimana kalau misalnya perusahaan yang sudah lapor EITI itu bisa dapatkan privilege juga dapat sertifikat bahwa dia adalah perusahaan yang taat terus dia bisa mencantumkan logo EITI entah dilaporannya atau disegala macam itukan seperti insentive buat perusahaan, seperti kita pasang logo ISO terus ini EITI. Itu sebagai bentuk apresiasi, nanti ada bedanya antara yang suka melapor dan yang tidak melapor.
- **Tanggapan Hendra Sinadia - APBI**
 - Mungkin kita bisa kerjasama dengan kantornya Pak Wafid, jadi asosiasi nanti yang seleksi. Bolehlah nanti kita bicarakan lagi soal logo itu bagus itu.
- EITI will be use action for brending transparansi, jadi mungkin nanti EITI reporter brandingnya.
- **Tanggapan Hendra Sinadia - APBI**
 - Ini kapan harus di sign sebelum tanggal 27 ya? Tolong di routing lagi disaya sih sudah oke sih tinggal di tanda tangan saja. Kalau semua sudah oke kita tanda tangan saja besok.
- Mas doni tolong di routing ke IMA dan IPA work plannya, corrective action.
- Kita beralih ke MSG Governance, pertama tentang partisipasi yang ke dua tentang outreach activities. Action yang pertama MSG Members from government pillars are consisted of echelon 1, however their participation in the MSG meeting are mostly represented by lower level government officer. This behavior is common bureaucratic

practice in Indonesia. In the future EITI will improve the TOR of MSG governance to ensure that the representatives of government officials attending in the MSG meeting will be provided with assignment letter indicating the assignment and authority to make decision on behalf of the MSG member represented. Jadi selama ini kan Bapak Ibu datang mewakili anggota MSG yang sebenarnya, anggota MSG yang sebenarnya Pak Dirjen Minerba, Pak Sekjen, Pak Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Pajak dan sebagainya kan tidak mungkin Beliau hadir di rapat-rapat seperti ini, jadi kalau hadir ada disposisi nanti diundangannya di bikin semacam lembaran semacam mendisposisikan kehadiran siapa disitu begitu. Jadi penunjukkan dari anggota MSG sendiri jadi proses ini berjalan di TOR MSG nanti kita cantumkan hal ini, intinya seperti itu. Proses pendelegasian anggota kepada yang hadir, dan yang hadir diberikan hak untuk mewakili anggota MSG untuk mengambil keputusan atas nama anggota. Pertanyaannya adalah kadang-kadang apakah semua keputusan bisa diambil oleh semua orang, kalau saya jawabnya begini misalkan yang hadir merasa kapasitasnya tidak bisa memutuskan itu mereka akan konsultasikan kepada pimpinannya kemudian menyampaikan apa keputusannya.

- Jadi nanti di TOR MSG akan kita tambahkan, karena di Internasional itu menganggapnya anggota MSG Dirjen Eselon 1, kok yang hadir malah tidak pernah eselon 1 nya. Kalau mereka caranya begini kalau eselon 1 nya tidak bisa harus ada alternatif kalau kitakan alternatifnya Direktur dan Direktur disuruh rapat-rapat seperti ini kan tidak mungkin juga kan biasanya per disposisi dan ini yang akan kita tulis di TOR nya MSG.
- Kemudian ensure the member of MSG receive updated discussion in the MSG meeting kitakan selalu setelah rapat nanti ada rekaman kita buat Minute of Meeting. Sekitar satu minggu kita distribusikan kepada anggota MSG dan itulah yang sebagai report back kepada anggota MSG, jadi anggota MSG walaupun tidak hadir secara formal dia sudah disampaikan hasilnya apa kira kira seperti itu, di TOR nanti harus ada seperti itu. Ini tugas dari kita untuk di adjust ke sekretariat.
- Tentang outreach activities kita hanya akan menyampaikan saja daftar, serta diskripsi tentang outreach activities kita, kemarin kita sudah melakukan FGD tentang DBH, DMO, Data reporting, EITI report launching, Diskusi participating interest untuk migas, kemudian contract disclosure, Diskusi tentang BO, dan dua point terakhir yang dilakukan oleh PWYP Open data, dan Tax fraud. Kita sudah cukup banyak melakukan diskusi dan sosialisasi tentang berbagai macam issue.
- Kemudian outreach ada media, publication, press release, dan social media.
- Kemudian yang ke tiga, Work plan document kita akan mengupdate work plan with detail information concerning objective, steps to be taken to achieve the objectives, constraints/tantangan, and measure/indikator apa yang akan dicapai, di work plan 2020 kita diminta untuk memasukkan mainstreaming, BO disclosure, Contract disclosure, Commodity trading, yang berikutnya ada plan to improve MSG capacity, Scope of EITI reporting akan mencakup comprehensiveness, disaggregation of revenue stream, kemudian ada legal regulatory assessment plan, jadi kita pernah melakukan impact study ada rekomendasi tentang perubahan struktur dari EITI kalau sekarang ada dua level jadi ada pertama ada yang isinya para menteri dan dibawahnya ada pelaksana eselon 1, dilaporan impact assessment itu ada saran antara lain bikin satu level saja, tapi di Indonesia agak susah juga mungkin harus kita diskusikan tentang ini apa langkah tindak lanjutnya, kemudian berikutnya step to implement recommendation ini juga rekomendasi dibahas dalam laporan berikutnya. Kita sudah buat work plan nya isinya antara lain ini semua tadi.
- Kemudian nomor empat lesson learnt and recommendations yaitu implementation of BO roadmap has been implemented in EITI report 2016 (published in December 2018) ini jadi kita bikin roadmap belajar dari BO disclosure, kita buat roadmap 2016 di implementation oleh EITI report dan sekarang sudah jadi regulasi ada Perpres nomor

13/2018 tentang BO artinya lesson learnt nya dari kita, kita buat rencana sudah jadi regulasi sudah terjadi sistem dikumham ada BO registration diminerba juga sudah ada sudah berjalan dan kemudian kita sudah publish BO information di laporan EITI tahun 2018 dan di tahun 2019 ini kita akan meminta data dari kumham dan kumham sudah punya sekitar 31 ribu data tentang BO perusahaan dan kita sudah minta data perusahaan migas dan minerba yang kita wajibkan lapor dan kita minta apakah data BO nya ada di mereka jika ada maka kita akan dapatkan datanya ini sebagai cross check.

- Tentang comprehensiveness ini akan dibahas dilaporan di alporan independent administrator kalau ada data revenue yang tidak di cover harus dijelaskan kenapa kalau tadi ada data dari perusahaan yang tidak lapor itu berapa persen dan alasannya seperti apa jadi semua penerimaan negara harus didiskusikan disini ini di cover di laporan IA.
- Kemudian disaggregation dan reliability of data sama akan dilakukan oleh IA didalam EITI report.
- Kemudian sub national transfer ini Dirjen Perimbangan Keuangan jadi kita diminta data alokasi sama data realisasi itu sudah ada permennya kemarin 2015 kita sudah dapat jadi nanti kita submit saja, jadi alokasi 2015 seperti apa realisasinya apa intinya begitu. Kemudian dilaporan berikutnya IA yang sekarang sudah kita minta untuk menyampaikan masukan ata-data itu juga.
- Kemudian yang social expenditure untuk yang minerba ada dibagi rinciannya dan rinciannya apakah mandatory atau voluntary kalau CSR kan tidak mandatory tapi voluntary, yang mandatory PPM itu nanti kita minta data PPM nya jadi, alokasinya untuk apa in cash atau in kind rasanya semuanya in kind, siapa yang memperoleh manfaat, kemudian jenis programnya seperti apa.
- Yang berikutnya ada Quasi fiscal Expenditure ini kita akan menjelaskan diskusi tentang DMO jadi salah satu quasi fiscal expenditure adalah DMO batubara contohnya, jadi batubara waktu ada peraturan DMO perusahaan batubara harus menjual untuk DMO seharga yang ditetapkan 70 USD padahal pada waktu itu harga pasaran diatas itu 90 atau 100 gep antara market price dan harga yang ditetapkan oleh DMO itu adalah Quasi Fiscal Expenditure untuk perusahaan jadi ini dalam hal ini BUMN, jadi itu yang harus dijelaskan di EITI reportnya. Tapi kita juga akan menjelaskan bahwa MSG sudah pernah mendiskusikan itu dalam bentuk FGD tentang DMO hanya waktu diskusi kita bilang bahwa itu quasi fiscal tapi kita menyebutkan bahwa itu ada mekanismenya.
- Jadi itu ada 9 yang harus kita perbaiki, kalau nomor 10 sebetulnya sudah hijau muda tadi itu License register dan License allocation dan BO nya juga tambahan.
- Baik sebelum kita masuk ke work plan oleh Pak Ruwadi, mungkin ada yang mau kasih masukan?

- **Tanggapan Ilham Budi – Ditjen Minerba**

- Terkait perwakilan dari instansi tadi pak, usulannya kan ke Direktur Jenderal untuk 2020 paling tidak sebelum di meeting kemarinkan ada surat dari EITI mungkin bisa ditunjukan ke Pak Dirjen atau Sekretaris Dirjen untuk mengusulkan nama tersebut nanti yang akan mewakili minerba kalau saya lihat 2019 disposisinya turunnya beda-beda pak kadang di program kadang di penerimaan ketika ada hasil rapat yang terakhir kami tidak update apa yang perlu di tindaklanjuti di rapat berikutnya jadi missing antara rapat yang sebelumnya dan rapat yang ini, kami baru sekali ini pak gabung di rapat EITI. Kalau boleh usul mungkin ada permintaan pejabat atau nama atau tehnik untuk mengikuti proses pengumpulan data MSG, kalau nanti diperlukan kehadiran eselon II pada saat final report, kalau boleh usul seperti itu pak. Sedangkan data di minerba sendirikan ada di penerimaan ada di perusahaan ada di program juga. Kalau nama kan kadang susah mungkin boleh jabatannya saja.
- Jadi intinya ada permintaan dari EITI kepada Pak Dirjen dalam hal ini anggota MSG

untuk meminta PIC yang akan mengikuti terus perkembangan rapat, untuk menjadi wakil di dalam MSG. Barangkali ini setiap tahun ya di awal tahun kita meminta surat karena pejabatnyakan mungkin ganti ya. Bagusnya level apa ? (Jawab : minimal Eselon III aja sih pak). Kalau gitu gini saja, pejabat teknis yang mengkoordinasikan sebagai perwakilan di MSG EITI yang mengkoordinasikan data-data dari Dirjen Minerba gitu aja ya.

- Apa masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada Pak Ruwadi masuk ke Work Plan.

10. Ruwadi – Sekretariat EITI

- Baik kami akan melanjutkan pembahasan materi terakhir dari rapat MSG ini sebagaimana tadi disampaikan bahwa salah satu tindak lanjut dari hasil validasi yang kita diskusikan dengan Sekretariat EITI International salah satunya adalah untuk mengupdate work plan sesuai dengan persyaratan terbaru Standar EITI 2019 dan juga sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan hasil validasi, nah ini adalah draft work plan yang kita design ini masih draft karena akhirnya tentu masih ada rapat pembahasan dan disetujui oleh MSG.
 - **Tanggapan Hendra Sinadia - APBI**
 - Disetujuinya hari ini juga ?
 - **Tanggapan Edi Effendi – Sekretariat EITI**
 - Apakah sepakat kalau draft ini kita paparkan kalau anggota MSG sepakat bisa di sepakati menjadi work plan kita lihat apakah ada masukan-masukan lagi yang lain.
- Format work plan ini diambil dari format yang dibuat oleh negara dan telah diterima oleh Sekretariat International EITI, dari work plan ini ada beberapa unsur yang kita tulis yang pertama adalah tujuan nasional pelaksanaan EITI di Indonesia kemudian dari tujuan nasional itu kita merumuskan sasaran kegiatan kemudian kita break down apakah tantangan-tantangan yang di perlukan untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut sehingga kita bisa mendesign rencana kegiatan secara lebih detail kegiatan per kegiatan untuk mencapai sasaran kegiatan tadi kemudian output dari masing-masing kegiatan kita jabarkan selain itu juga itu penanggung jawab yang terlibat didalam pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian stakeholder terkait mungkin ini perlu kami tambahkan baru menuliskan penanggung jawab dari kegiatan tersebut, kemudian diharuskan oleh standar EITI bahwa setiap kegiatan di dalam rencana kerja ini harus menampilkan sejumlah anggaran tertentu jika memang kegiatan tersebut membutuhkan anggaran kemudian juga harus terikat oleh waktu kapan pelaksanaannya. Itu adalah secara garis besar unsur-unsur yang harus ditulis didalam work plan.
- Terkait rencana kerja di tahun 2020 yang kita design ada 4 tujuan sasaran nasional yang akan kita bahas di rencana kerja kita ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan transparansi informasi dan tata kelola industri ekstraktif, kedua mendorong perbaikan tata kelola industri ekstraktif, ketiga membantu mendorong pencegahan korupsi, keempat membantu mendorong peningkatan kontribusi di sektor industri ekstraktif dalam perekonomian nasional, kita bahas satu per satu.
- Meningkatkan transparansi informasi dan tata kelola industri ekstraktif sasaran yang pertama adalah mainstreaming data dan informasi industri ekstraktif, mainstreaming disini maksudnya adalah kita membuka data mengakses ke publik dari sumbernya, sumber yang dimaksud adalah sumber pengelolaan data yang dalam hal ini masih level pemerintahan di minerba di ESDM, Dirjen minerba di SKK Migas. Tantangannya adalah yang pertama ketersediaan data dalam open access system, kedua adalah disintegrasikan data maksudnya adalah data yang dimintakan standar EITI harus sedetil mungkin contohnya tadi data produksi harus menampilkan data produksi

per perusahaan bukan secara agregat kemudian akses ke publik harus sebisa mungkin tidak membebani publik mengakses dengan biasa yang besar, rencana kegiatan yang direncanakan oleh EITI yang pertama adalah koordinasi dengan instansi pemerintah pemilik data dalam hal ini minerba, SKK Migas kemudian diskusi sosialisasi tentang standar EITI 2019 untuk memberikan pemahaman yang sama agar kita bicara dalam satu halaman yang sama data semacam apa yang di persyaratkan EITI yang ketiga adalah perbaikan portal industri ekstraktif jadi kementerian perekonomian yang memiliki portal data industri ekstraktif yang kami rasa belum memenuhi untuk mainstreaming maka salah satu rencananya adalah untuk memperbaiki portal data tersebut, output dari rencana kegiatan ini adalah yang pertama portal data industri ekstraktif dari masing-masing sumber sebetulnya dari minerba sudah cukup baik yaitu ada MODI, MOMI yang kedua adalah portal data industri ekstraktif sebagai pelengkap kekurangan dari sumbernya jadi apabila dari sumber tadi kurang ada dua unsur yang harus dibuka yang pertama dari unsur pemerintah yang kedua dari unsur perusahaan maka portal data yang ada di kementerian perekonomian akan menjadi jembatan untuk data yang akan disampaikan oleh perusahaan, untuk penanggung jawabnya bagian pertama dan kedua untuk koordinasi standar EITI MSG dan untuk portal data oleh Kementerian Perekonomian dan Sekretariat EITI, kemudian ada anggaran yang terlibat disitu harapannya semua bisa dikerjakan pada quarter ke tiga dan keempat 2020.

- Yang kedua untuk peningkatan transparansi adalah sosialisasi dan diskusi publik tentang isu-isu di sektor industri ekstraktif rencana kegiatannya adalah mengadakan tiga kegiatan sosialisasi dengan stakeholder terkait termasuk dengan pemerintah daerah tentu sifatnya karena ini sosialisasi adalah rekomendasi terkait isu-isu khusus pada industri ekstraktif jadi tidak semua isu kita akan pilih 3 isu yang perlu kita untuk di diskusikan penanggung jawabnya adalah MSG kemudian dilaksanakan pada triwulan kedua ketiga dan keempat.
- Kemudian yang ketiga mendorong keterbukaan dokumen kontrak dan izin, standar EITI memang mengharuskan kontrak dan izin sebisa mungkin dibuka secara full teks tapi tentu itu tidak bisa kita lakukan kita juga sudah melaksanakan FGD sebelumnya dengan biro hukum ESDM yang boleh diberikan datanya itu dijikasinya jadi bukan full teks yang sebetulnya dokumen izin ini secara inti sudah muncul didalam MODI didalam data perusahaan sudah ada nomor izinnya dan kapan izin itu keluar. Hanya saja didalam standar EITI dalam hal ini meminta secara full teks namun kami masih belum bisa untuk memenuhi. Tantangan yang pertama adalah regulasi saat ini kemudian yang kedua perlu dilakukan uji konsekuensi publik ini adalah hasil dari sidang KIP, bahwa Minerba membutuhkan uji konsekuensi publik untuk membuka data, kemudian rencana kegiatannya yang riil untuk koordinasi dengan pihak terkait di ESDM.
- Yang keempat mendorong implementasi pembukaan data beneficial ownership (BO) kita akan bertukar informasi dengan Kumham targetnya minimal 50% perusahaan yang wajib lapor dapat kita buka data BO nya.
- Kemudian kelima mendorong keterbukaan informasi commodity trading migas ini adalah yang rumit karena komoditi trading misalnya impor migas oleh Pertamina ini sangat sensitif informasinya karena kami melakukan diskusi dengan Pertamina menyangkut dengan ketahanan RI Nasional juga kami belum memiliki cara untuk membuka data perdagangan komoditas, rencana kegiatan yang riil adalah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai, BPS, Pertamina, outputnya adalah rekomendasi terkait status kerahasiaan data-data commodity trading harapannya dapat dilakukan pada quarter keempat 2020.
- Keenam menyusun laporan EITI tahun pelaporan 2018 dan ketujuh adalah memproduksi dan mempublikasi isu-isu industri ekstraktif melalui berbagai media outputnya adalah info grafis yang terkait tata kelola industri ekstraktif di Indonesia di

targetkan di tahun 2020 untuk infografis ada 4 infografis.

- Kemudian untuk tujuan yang kedua mendorong perbaikan tata kelola industri ekstraktif, ada 5 rencana kegiatan besar yang harus dilakukan pertama capacity building stakeholder terkait skema gross split, kedua tentang DMO batubara, ketiga BUMN industri ekstraktif, keempat terkait sustainability dan peningkatan nilai tambah sektor pertambangan mineral dan batubara yang kelima menindaklanjuti rekomendasi kajian dampak (impact assessment) EITI rencana kegiatannya adalah diskusi publik terkait dengan isu tadi untuk capacity building.
- Yang ketiga membantu mendorong pencegahan korupsi memang arah dari EITI International bukan lagi mengarah ke transparansi karena transparansi barangkali sudah mencukupi namun lebih ke impact transparansi untuk mencegah korupsi rencana kegiatannya adalah koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan pencegahan korupsi outputnya adalah pemahaman yang sama antar stakeholder terkait dengan pelaksanaan EITI dalam hubungan pencegahan korupsi.
- Kemudian yang keempat adalah membantu mendorong peningkatan kontribusi di sektor industri ekstraktif dalam perekonomian nasional, sasaran kegiatannya adalah memberikan isu-isu industri ekstraktif dengan stakeholder dari unsur pelaku industri rencana kegiatannya kita berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan peningkatan kontribusi ekonomi dari sektor industri ekstraktif outputnya untuk pemahaman yang sama antar stakeholder terkait dengan pelaksanaan EITI dalam hubungan peningkatan kontribusi ekonomi dari sektor industri ekstraktif penanggung jawabnya MSG diharapkan quarter ke empat 2020 bisa terlaksana.
- Baik Bapak Ibu sekalian rencana kerja yang kami draft kan sebetulnya ini harus dibahas didalam MSG secara detail dan untuk di setuju rencananya draft ini akan menjadi bagian dari perbaikan perbaikan hasil temuan validasi karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Edi didalam hasil validasi sementara penilaian terhadap Indonesia didalam pelaksanaan EITI ini masih ada 9 standar EITI yang dianggap Indonesia tidak memenuhi progress yang mencukupi, sehingga kita di kartu kuning untuk 9 kategori dari 33 total belum mencukupi . Nah ini akan berdampak pada secara kumulatif bisa disuspend namun dari pihak Kemenko Perekonomian Pak Montty selaku ketua tim pelaksana telah mengirimkan surat untuk datang terhadap hasil validasi namun hasil diskusi dengan EITI International kita sudah mendapatkan point-point yang akan dilakukan untuk memperbaiki hasil temuan validasi tersebut, point inilah yang salah satunya kita harus membuat workplan seperti ini barang kali itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada masukan atau tanggapan?

- **Tanggapan Tanggapan Ilham Budi – Ditjen Minerba**

- Pak edi ini masukan saja tentang keterbukaan kontrak kebijakan keterbukaan kontraknya secara terbatas sebaiknya ada surat resmi tentang work plan ini nanti akan jadi pertimbangan pimpinan kami tidakbisa memutuskan didalam forum ini.

- **Tanggapan Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Pertama work plan ini masih dalam bentuk draft karena masih perlu disepakati oleh seluruh anggota EITI yang kedua disini kita memang sasarannya hanya mendorong, EITI mendorong keterbukaan dokumen kontrak dan izin jadi bukan berarti kita memaksa kebijakannya ada disana. Pertanyaannya adalah regulasi saat ini yang berlaku seperti apa? Perlunya dilakukan uji konsekuensi publik dan adalah kewenangan yang punya kontrak dalam hal ini ESDM. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita berkoordinasi dengan bagian bagian terkait di ESDM jadi kita berusaha se-soft mungkin jadi tahun depan kegiatannya hanya berkoordinasi teman-teman di ESDM untuk mengatasi regulasi saat ini masih belum terbuka semua, kemudian outputnya apa? Outputnya adalah akses terhadap data kontrak

jadi bukan dokumen kontrak itu sendiri kalau akses data kontrak sebagian sudah terbuka di MODI di geo portal, jadi akses terhadap data-data kontrak seperti itu sudah terbuka, kalau yang tidak boleh kan dokumennya. Tapi draft work plan ini masih berupa draft belum resmi masih didiskusikan kembali.

- **Tanggapan Ilham Budi – Ditjen Minerba**

- Apakah data goal dari EITI semacam indeks transparansi? Apakah ada indeks yang harus di capai dalam international?
- Jawab : Indeks belum ada pak, namun kita ada standar yang terakhir 2019 apa yang arus dilakukan negara-negara pelaksana EITI tersebut antara lain keterbukaan kontrak ini yang dibuat pada tahun 2021 apa yang diubah dan dibuat di 2021. Kontrak yang sebelum 2021 masih disarankan dibuka . Oke nanti kita share dan dibahas lagi di rapat MSG yang akan datang.

11. Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Jika tidak ada tanggapan lagi Pak Ruwadi yang work plan ini masih harus kita tambahkan lagi TOR kemudian data-data termasuk yang data PPM, tapi batasnya sampai dengan besok. Oke sementara kita tutup dan kita akan sub up kita kirim dengan suratnya Pak Montty sebagai ketua tim pelaksana.

D. Penutup

- Rapat ditutup oleh Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Tim Leader EITI. Pertama saya ucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu anggota MSG yang telah mengikuti pembahasan tiga agenda kita hari ini, saya kira demikian saya mohon maaf kalau dalam diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan atas nama Pak Bastian selaku Sekretaris Tim Pelaksana saya ucapkan terimakasih.

E. Simpulan dan Saran

- Data yang terkumpul untuk penyusunan Laporan EITI 2017 masih sekitar 60 – 70% sehingga harus dipercepat mengingat laporan harus dipublikasikan di akhir tahun 2019 ini.
- Jadwal untuk penyusunan Laporan EITI yang disepakati yaitu Tanggal 09 Desember 2019 akan diadakan Konsinyering, Tanggal 11 Desember 2019 Draft Final report via email, tanggal 13 Desember 2019 Rapat Tim Pelaksana EITI, dan Tanggal 20 Desember 2019 Kesepakatan Laporan di Rapat Tim Pelaksana EITI.
- Tim Pelaksana EITI diharapkan untuk memberikan tambahan masukan dan informasi ke validator EITI Internasional sebelum tanggal 27 November 2019, karena di tanggal tersebut akan diadakan pertemuan untuk membahas validasi EITI Indonesia.

